

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RENSTRA Tahun 2018 - 2023, LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018 - 2023).

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan

aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yang keempatnya sudah mencapai sesuai yang ditargetkan. Namun untuk pelaksanaan kedepannya masih perlu dilaksanakan peningkatan target yang akan dicapai agar pencapaian kinerja bisa terus ditingkatkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 11 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4.Isu Strategis.....	2
1.5.Inovasi Pelayanan Publik.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1.Rencana Strategis.....	16
2.1.1.Visi	16
2.1.1.Misi.....	16
2.2.Indikator Kinerja Utama	20
2.3.Perjanjian Kinerja 2018	21
2.4.Rencana Anggaran Tahun 2018.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
BAB IV PENUTUP	48

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bone tahun 2016 , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas pokok : membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perisiann dan non perizinan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan administrsi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) Kepala Bidang dan 23 (dua Puluh Tiga) Tim Tekhnis.

- Sekretaris
Tugas pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan

Fungsi :

- Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pelaksanaan program dan anggran;
 - Pengoordinasian tugas tugas pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas;
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal
Tugas pokok : melaksanakan urusan pengkajian, pengembangan dan menyusun kebijakan di bidang penanaman modal.

Fungsi :

- Penyiapan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan yang berkaitan dengan Penanaman Modal;
- Penyiapan penyusunan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat;

-
- Pelaksanaan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan serta pedoman tata cara pelaksanaan penanaman modal;
 - Penyusunan dan perumusan pemberian insentif khusus penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah;
 - Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan pengembangan penanaman modal;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
 - Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Kerjasama, Promosi Dan Pelayanan Penanaman Modal
Tugas pokok : menyelenggarakan segala urusan kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah

Fungsi :

- Penyiapan rencana kerjasama dan promosi penanaman modal;
 - Penyiapan dan mengkoordinir pelayanan penanaman modal;
 - Penyiapan dan mempelajari regulasi penanaman modal terkait dengan kerjasama, promosi dan pelayanan;
 - Pelaksanaan promosi peluang investasi di Kabupaten Bone;
 - Penyiapan bahan-bahan promosi penanaman modal;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Data, sistem informasi, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal
Tugas pokok: menyelenggarakan segala urusan data, sistem informasi, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal

Fungsi :

- Penyiapan dan menyusun rencana kegiatan sistem informasi, data dan peluang investasi serta pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
 - Penyusunan dan membuat peta penanaman modal;
 - Penyusunan dan menyiapkan kebijakan teknis peluang investasi penanaman modal;
 - Penyiapan data investor / penanaman modal di Kabupaten Bone;
 - Pelaksanaan monitoring pelaksanaan pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang informasi, pengaduan dan pelayanan perizinan
- Tugas pokok :** menyelenggarakan segala urusan informasi perizinan, pengaduan perizinan, dan pelayanan perizinan dengan prinsip pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi :

- Penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis pelayanan informasi dan pengaduan perizinan.
- Pengordinasian aparatur di tiap loket pelayanan pada *Front Office*.
- Pengelolaan pengaduan yang muncul akibat penyelenggaraan pelayanan.
- Perumusan dan penyiapan bahan dan data pelayanan perizinan dengan prinsip penyederhanaan.

-
- Penyiapan fasilitas pelayanan yang *user friendly*.
 - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya
 - Bidang pengkajian dan pemrosesan perizinan

Tugas pokok : untuk mengkaji dan memproses penerbitan permohonan perizinan

Fungsi :

- Penyusunan dan merumuskan segala kebijakan teknis penerbitan izin, serta mempelajari segala peraturan perundang-undangan terkait hal-hal teknis perizinan;
- Pengordinasian Tim Kerja Teknis dalam rangka proses penerbitan izin dan peninjauan lapangan;
- Penyiapan bahan dan fasilitas dalam proses penerbitan izin;
- Pengordinasian aparatur yang bertugas di *Back Office*;
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi atas kebenaran dokumen permohonan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.
- Bidang Monitoring dan Evaluasi

Tugas pokok : menyelenggarakan segala urusan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan

Fungsi :

- Penyiapan dan merumuskan kebijakan teknis terkait monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pengumpulan, mempelajari regulasi dan mengembangkan bentuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan;
- Pengumpulan data pemohon dan data penerbitan izin;
- Penyusunan dan merumuskan rencana kegiatan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- Kepala dinas
- Sekretaris
- Sub bagian umum dan kepegawaian;
- Sub bagian program;
- Sub bagian keuangan.
- Bidang pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal
 - Seksi pengkajian dan pengembangan penanaman modal;
 - Seksi pengembangan penanaman modal; dan
 - Seksi pendidikan dan pelatihan penanaman modal

-
- Bidang kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal
 - Seksi kerjasama penanaman modal;
 - Seksi promosi penanaman modal; dan
 - Seksi pelayanan penanaman modal
 - Bidang data, sistem informasi, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal
 - Seksi data dan potensi penanaman modal;
 - Seksi informasi penanaman modal; dan
 - Seksi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal.
 - Bidang informasi, pengaduan dan pelayanan perizinan
 - Seksi pelayanan informasi dan pengaduan perizinan; dan
 - Seksi pelayanan pendaftaran ndan penyerahan perizinan
 - Bidang pengkajian dan pemrosesan perizinan
 - Seksi pengkajian dan penelitian perizinan; dan
 - Seksi penerbitan dan pengarsipan perizinan
 - Bidang monitoring dan evaluasi
 - Seksi monitoring penyelenggaraan perizinan;
 - Seksi evaluasi dan pelaporan perizinan;
 - Seksi pengawasan dan pengendalian perizinan.
 - UPTD
 - Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Untuk lebih jelas dari susunan organisasi dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimiliki yang merupakan elemen penting dalam menggerakkan organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Susunan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :
 - Golongan IV : 9 orang
 - Golongan III : 20 orang
 - Golongan II : 1 orang
 - Pegawai Tidak Tetap: 46 orang
- Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 1
SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut tingkat pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	Pasca Sarajana	7	3	10
2	Sarjana	21	32	53
3	Diploma 3 (D3)	1		1
4	SMA	1	11	12
Total		30	46	74

- Menurut eselon, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dapat dikelompokkan menjadi :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 7 orang
- Eselon IV : 18 orang
- Non Eselon : 4 orang

Tabel 1.2
Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2018

No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1	SD	-	1	I	-	1	Struktural	26
2	SMP	-	2	II	1		- Eselon II	1
3	SMA	1	3	III	20		- Eselon III	7
4	Diploma 1	-	4	IV	9		- Eselon IV	18
5	Diploma 2	-				2	Fungsional	
6	Sarmuda/D3	1						
7	Strata 1	21						
8	Strata 2	7						
						3	Staf	4
Jumlah		30	Jumlah		30	Jumlah		30

Tenaga ASN sebanyak 30 orang terdiri dari :

- a. Sarjana (S2) : 7 (Tujuh) Orang
- b. Sarjana (S1) : 21 (Dua Puluh Satu) Orang
- c. Diploma III (D3) : 1 (Satu) Orang
- d. SMU / Sederajat : 1 (Dua) Orang

1.4 ISU STRATEGIS

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan sasaran utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone guna pencapaian visi, misi

dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2018-2023*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone, terdiri dari :

a) *Faktor Internal*

Kekuatan organisasi secara internal, yaitu :

- a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/ pemohon izin;
- c) Tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan secara Elektronik (SIMPEL) untuk mendukung proses perizinan dan non perizinan.

Kelemahan organisasi secara internal, yaitu :

- a) Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal dan belum memadai;
- b) Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- c) Koordinasi antar bidang belum optimal;
- d) Keterbatasan anggaran;
- e) Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;

b) Faktor Eksternal

1). Peluang

- a) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- b) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).
- c) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;

2). Ancaman

- a) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- c) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- d) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;

-
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
 - ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 - ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
 - ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pelayanan Izin secara on line melalui aplikasi SIMPEL yang dapat diakses melalui website www.dpmpptsp.bone.go.id dan untuk tahun 2018 telah dikembangkan melalui aplikasi “*SIMPEL BONE*” yang dapat di download di playstore.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI :

Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah pada misi :

1. Misi kesatu : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

-
2. Misi Kelima kelima, yakni: “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public”

Tujuan Dan Indkator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
- Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai PMDN/ PMA pertahun

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2018-2023

TUJUAN	INDIKATOR
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP
Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun

Dengan melihat hasil predikat evaluasi SAKIP Tahun 2018-2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Provinsi dan Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi maka kami diharapkan untuk memperbaiki dokumen akuntabilitas yang menjadi bahan pengukuran Nilai SAKIP. Yang selanjutnya kami laporkan dalam penyusunan dokumen ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Indeks		A
Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		A
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun	Indeks		250M

Sasaran Dan Indikator Kinerja

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone.

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Presentase Rumah ber IMB
- Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi Izin Usaha
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin Usaha
- Nilai PMDN / PMA pertahun.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Indeks	CC	A
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	Persen	70%	A 88,31 - 100
	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	Persen		85%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A-	80%
	Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Persen		97%

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun	Rupiah	135.925 M	250M

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2018 - 2023, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone

SASARAN	PROGRAM STRATEGIS
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan Umum
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone, tanggal 13 November 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
	Persentase Rumah Ber-IMB	Persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan Rumah}} \times 100\%$
	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	Persen	$\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan yang memiliki izin}}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan}} \times 100\%$
Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun	Rupiah	Nilai PMDN / PMA per tahun

2.3 PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan oleh Bupati Bone terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kab. Bone.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD Kab. Bone dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019, dan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sebagai wujud komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2019, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Daerah dengan Bapak Bupati Bone. (tersaji pada *Lampiran 1*).

Tabel 2.5
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Indeks	B
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan	Indeks	71-78 (A-)
		Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks	100%
		Persentase Rumah Ber-IMB	Persen	75%

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	Persen	65%
3	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN/PMA Tahunan	Rupiah	150M

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp 11.603.882.601** ,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019

BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	
	DPPA No. 05 Tahun 2018 Tgl. 11 Oktober 2018	DPPA No. 226 Tahun 2019 Tgl. 12 Agustus 2019
1	3	2
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 4.600.000.000	Rp 4.750.000.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	Rp 2.581.162.831	Rp 3.953.882.601
BELANJA LANGSUNG	Rp 3.100.000.000	Rp 7.650.000.000
- Belanja Pegawai	Rp 140.850.000	Rp -
- Barang dan Jasa	Rp 2.740.205.000	Rp 2.594.800.000
- Belanja Modal	Rp 218.945.000	Rp 5.055.200.000
TOTAL ANGGARAN	Rp 5.681.162.831	Rp 11.603.882.601

Anggaran belanja langsung senilai Rp. 7.650.000.000,- (setelah perubahan) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019, terdiri dari 9 Program dan 33 Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Alokasi Anggaran Per Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PERSEN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 807.741.400	11%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (Rekening)	Rp 130.320.000	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang)	Rp 34.452.000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis, Orang)	Rp 14.203.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (Media)	Rp 37.300.000	
			Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 345.000.000	
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 246.466.400	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 5.261.930.000	69%
			Pembangunan Gedung Kantor (Unit)	Rp 5.000.000.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	Rp 81.400.000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	Rp 137.480.000	
			Pemeliharaan Rutin,berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	Rp 43.050.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 91.159.000	1%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PERSEN
			Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	Rp 22.125.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang undangan (Kecamatan)	Rp 56.584.000	
			Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan (Orang)	Rp 12.450.000	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp 9.420.000	0%
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Rp 9.420.000	
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp 59.565.500	1%
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Dokumen)	Rp 32.820.000	
			Pengelola Website Perangkat Daerah (Paket)	Rp 26.745.500	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Persentase Rumah Ber-IMB	75%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 859.451.800	11%
	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	65%	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan (Izin)	Rp 105.449.000	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	71-78 (A-)	Pelayanan Administrasi Perizinan (Izin)	Rp 103.162.500	
	Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	100%	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan (Dok)	Rp 4.724.900	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan (Dok)	Rp 39.594.100	
			Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan (Dok)	Rp 94.490.800	
			Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan (Izin)	Rp 396.761.800	
			Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	Rp 13.432.600	
			Penanganan Pengaduan Pelayanan (Laporan)	Rp 14.286.100	
			Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan (Dok)	Rp 87.550.000	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PERSEN
Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun	150M	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 31.764.200	0%
			Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal (Dok)	Rp 15.109.500	
			Peningkatan Pelayanan Investasi (Dok)	Rp 16.654.700	
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Rp 30.973.900	0%
			Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi (Dok)	Rp 28.583.900	
			Penyusunan Data Peluang Investasi (Buku)	Rp 2.390.000	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 497.994.200	7%
			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunias Usaha (Dok)	Rp 26.977.000	
			Peningkatan kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Keg)	Rp 32.455.000	
			Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi (Peserta)	Rp 33.410.000	
			Penyelenggaraan Pameran Investasi (Keg)	Rp 405.152.200	
TOTAL				Rp7.650.000.000	100%

Tabel tersebut diatas menjelaskan program dan kegiatan beserta anggarannya yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dalam mencapai target indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja/RKT) Tahun 2019 dan rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.

Dari tabel tersebut, jumlah anggaran untuk seluruh program dan kegiatan sebesar Rp. 7.650.000.000,-. Dari total 9 Program, 4 diantaranya adalah program prioritas yang secara strategis sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja Ketiga Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Bone, dan 5 Program lainnya merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ada. Persentase terbesar anggaran untuk mendukung Sasaran ke-1 dengan besaran 69% dari total anggaran belanja langsung. Pencapaian target indikator kinerja dari sasaran ini dilaksanakan dengan satu Program Utama yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Sementara itu sasaran kedua, sebesar 7% dari total anggaran belanja langsung yang dilaksanakan dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, *kedua sasaran tersebut memiliki presentase yang sangat jauh*. Namun secara keseluruhan, kesepuluh program beserta kegiatan tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lainnya dalam proses pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2019. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	$76 \% \leq 100\%$	Baik
3	$66 \% \leq 75 \%$	Cukup
4	$51 \% \leq 65 \%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2

Skala pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP

NO	KATEGORI	SKOR
1	AA (Sangat memuaskan)	7 (Tujuh)
2	A (Memuaskan)	6 (Enam)
3	BB (Sangat Baik)	5 (Lima)
4	B (Baik)	4 (Empat)
5	CC (Cukup)	3 (Tiga)
6	C (Kurang)	2 (Dua)
7	D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 pada intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun 2019. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Tahapan evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran strategis, meliputi :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2019;
2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2019 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2019 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2018-2023;
4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian target kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum, realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 telah memenuhi target kinerja dengan kategori Baik ($76\% \leq 100\%$), berdasarkan indikator sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Realisasi capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone dibandingkan dengan target dari setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	KRITERIA KINERJA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	100%	BAIK
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan	71-78 (A-)	B	67%	CUKUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	KRITERIA KINERJA
		Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	100%	BAIK
		Persentase Rumah Ber-IMB	75%	70%	93%	CUKUP
		Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	65%	71%	109%	BAIK SEKALI
3	Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN/PMA Pertahun	150M	158.260	106%	BAIK SEKALI
Rata rata capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran					96%	BAIK

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2019 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

*Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama*

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TERGET	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	71-78 (A-)	B	67%
2	Persentase Rumah Ber-IMB	75%	70%	93%
3	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	65%	71%	109%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TERGET	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
4	Nilai PMDN / PMA per tahun	150M	158.260	106%

Perbandingan Capaian Kinerja

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2019 sesuai dengan pernyataan kinerja yang telah diperjanjikan, maka untuk mengevaluasi capaian kinerjanya, dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator kinerja yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja dari setiap indikator sasaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi capaian kinerja organisasi. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan tujuh tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum meliputi perbandingan dan analisis terkait realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2019.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra Tahun 2018 - 2023 dan RPJMD Tahun 2018-2023, maka Tingkat Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2019 dapat dijelaskan melalui uraian perbandingan dan analisis realisasi kinerja dari tiap sasaran strategis berikut ini:

Sasaran Strategis Pertama :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1- Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	100%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian target nilai SAKIP mencapai 100% sesuai target yaitu Target B dan Realisasi B dengan kategori Baik.

2. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 1*

Tabel 3.3.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1. Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2017	2018	2019
Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	-	CC	B 100%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian predikat Evaluasi SAKIP dari tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding 2019, hal ini dapat kita lihat dari tabel diatas yang menunjukkan nilai yang dicapai pada tahun 2018 adalah CC dengan kategori cukup dan pada tahun 2019 memperoleh nilai B dengan kategori Baik. Sementara itu untuk perolehan di tahun 2017 indikator ini belum masuk dalam salah satu indikator sasaran sehingga data pada tahun 2017 tidak dapat kami sajikan.

3. *Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra*

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2019	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Indeks	A	B	67 %

Berdasarkan tabel diatas target capaian predikat evaluasi SAKIP pada akhir renstra yaitu A sedangkan pencapaian target pada Tahun 2019 adalah B dengan kategori baik, sehingga perbandingan capaian predikat SAKIP pada Tahun 2019 dengan target Akhir renstra sebesar 67%,

4. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.*

1. Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan tabel diatas pencapaian predikat evaluasi SAKIP pada Tahun 2019 mencapai nilai B atau 100% dengan kategori Baik, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Tahun 2018 pencapaian ini mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Melaksanakan BIMTEK penyusunan LKjIP dan PK setiap Tahun sejak Tahun 2018
- Memfasilitasi Timp Penyusunan SAKIP OPD untuk melakukan asistensi Dokumen SAKIP ke Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

5. *Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 1*

Tabel 3.3.3

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2019	EFISIENSI
1	2	3	4	(3-4)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	-	20%	-

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini belum dapat diukur dikarenakan capaian kinerja belum tersaji. Namun untuk anggaran yang mendukung pencapaian kinerja telah direalisasikan sebesar 20 persen.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 1

*Tabel 3.3.4
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1*

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 807.741.400	805.514.157	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (Rekening)	Rp 130.320.000	129.481.603	99%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (orang)	Rp 34.452.000	33.734.017	98%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis, Orang)	Rp 14.203.000	14.203.000	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (Media)	Rp 37.300.000	36.840.000	99%
	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 345.000.000	344.842.637	100%
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 246.466.400	246.412.900	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 5.261.930.000	252.736.354	5%
	Pembangunan Gedung Kantor (Unit)	Rp 5.000.000.000	0	0%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	Rp 81.400.000	81.400.000	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	Rp 137.480.000	128.286.354	93%

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pemeliharaan Rutin,berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	Rp 43.050.000	43.050.000	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 91.159.000	90.909.000	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	Rp 22.125.000	22.125.000	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan (Kecamatan)	Rp 56.584.000	56.334.000	100%
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan (Orang)	Rp 12.450.000	12.450.000	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp 9.420.000	9.170.000	97%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Rp 9.420.000	9.170.000	97%
	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp 59.565.500	59.065.500	99%
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Dokumen)	Rp 32.820.000	32.320.000	98%
	Pengelola Website Perangkat Daerah (Paket)	Rp 26.745.500	26.745.500	100%
		Rp6.229.815.900	Rp1.217.395.011	20%

Berdasarkan tabel diatas dari kelima program pada tabel diatas yang merupakan program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Penunjang Pemerintahan Umum dimana output dari kegiatan pada program ini adalah penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah namun demikian selain program tersebut juga terdapat tiga program pendukung lainnya yang sangat berperan dalam

pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu.

Tujuan dari program ini adalah untuk Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100%., kecuali pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang hanya terealisasi sebesar 4,80% hal ini disebabkan karena salah satu kegiatan dalam program tersebut tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan gedung kantor, kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan karena terjadi perubahan lokasi pembangunan sehingga proses proses pembangunan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung keempat program ini adalah sebesar Rp. **Rp6.229.815.900** realisasi sebesar Rp. **Rp1.217.395.011** atau 20% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
5. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
7. Pembangunan Gedung Kantor
8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
11. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
13. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
16. Pengelola Website Perangkat Daerah

7. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun pencapaian pada sasaran ini sudah memenuhi target bahkan melebihi predikat yang ditargetkan namun demikian pencapaian tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat tentang penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan.

Untuk itu perlu keikutsertaan aparat dalam pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perlu terus ditingkatkan mengingat peraturan peraturan terkait penyusunan tersebut terus menerus mengalami perubahan.

Sasaran Strategis Kedua :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

Tabel 3.4.1
Capaian Kinerja Sasaran 2- Tahun 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan perizinan	A- 71 – 78	B	67%
2	Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	100%
3	Persentase Rumah Ber-IMB	75%	70%	93%
4	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	65%	71%	109%

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat,

Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 mencapai 67% dengan nilai yang dicapai B dikategorikan Baik sementara target pada tahun 2019 A- dikategorikan Baik.

- **Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan.**

Berdasarkan tabel diatas presentase penanganan pengaduan yang diselesaikan mencapai 100%.

- **Presentase Rumah Ber – IMB**

Berdasarkan tabel diatas presentase Rumah Ber – IMB sebesar 70% dengan Jumlah Rumah wajib IMB tahun 2019 sebesar 192.375 dan rumah yang telah memiliki IMB sebesar 133.893.

- **Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha**

Berdasarkan tabel diatas pencapaian kinerja mencapai 109% dengan jumlah target sebesar 65% dan capaian mencapai 71 %.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran 2

*Tabel 3. 4.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2. Tahun 2018-2023*

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2017	2018	2019
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan perizinan	A-	A-	67% B
2	Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		100%	100%
3	Persentase Rumah Ber-IMB		70%	70%
4	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha			71%

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat,**

Berdasarkan tabel diatas nilai yang dicapai pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2017 dan 2018 dengan nilai indeks kepuasan ditahun 2019 adalah B dikategorikan baik.

- **Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan.**

Berdasarkan tabel diatas presentase penanganan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%.

- **Presentase Rumah Ber – IMB**

Berdasarkan tabel diatas presentase Rumah Ber – IMB pada tahun 2019 dan tahun 2018 relatif sama hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 rata rata IMB yang diterbitkan adalah IMB rumah yang baru dibangun.

- **Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha**

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 dan 2018 belum dilaksanakan sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sekarang dimana pada tahun 2019 mencapai 71% dengan jumlah pelaku usaha sebesar XXX dan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin sebesar XXX

3. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2019	CAPAIAN (%)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan perizinan	Indeks	A	B	83%
2	Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Persen	100%	100%	100%
3	Persentase Rumah Ber-IMB	Persen	95%	70%	78%
4	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	Persen	90%	71%	79%

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat,**

Berdasarkan tabel diatas nilai yang dicapai pada tahun 2019 sebanyak 67% persen dari target akhir renstra dimana pada akhir tahun Renstra ditargetkan Nilai A sedangkan pencapaian Tahun 2019 adalah B dengan kategori Baik.

- **Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan.**

Berdasarkan tabel diatas presentase penanganan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2019 mencapai 100% sesuai yang ditargetkan pada akhir tahun renstra untuk indikator ini diupayakan setiap tahun presentase capaian kinerja mencapai 100% artinya setiap kasus yang diadukan diselesaikan secara maksimal.

- **Presentase Rumah Ber – IMB**

Berdasarkan tabel diatas presentase Rumah Ber – IMB pada tahun 2019 mencapai 70% sementara target capaian pada akhir renstra sebesar 90% .

- **Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha**

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 mencapai 71% sementara target pada akhir renstra adalah 90% dan capaian 79%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat,**

Penyebab peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik terkait perizinan, selain itu komitmen dan kerjasama dari setiap unsur dalam hal ini beberapa Tim Tekhnis yang mendukung proses kajian penerbitan izin sehingga izin diterbitkan sesuai SOP yang merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Meskipun masih ada beberapa pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang kami lakukan akan tetapi hal tersebut merupakan tantangan bagi kami untuk terus melakukan inovasi dalam hal pelayanan publik terkait perizinan.

Pengawasan terhadap kerjasama beberapa Tim Tekhnis yang terkait dengan penerbitan izin juga akan terus ditingkatkan sehingga ditahun tahun selanjutnya pengaduan perizinan terus mengalami penurunan.

- **Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan.**

Salah satu solusi dalam meningkatkan pencapaian indikator ini adalah membuka ruang pengaduan selain dengan kotak aduan yang disediakan dalam ruang tunggu Kantor Pelayanan Perizinan juga kami siapkan dalam salah satu

kolom website Dinas Penanaman Modal serta Aplikasi Layanan perizinan dalam hal ini kami beri nama SIMPEL, hal tersebut kami lakukan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ke kantor kami sebagaimana motto kami “*Pengaduan Anda Adalah Tantangan Bagi Kami*”.

- **Persentase Rumah Ber-IMB**

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan anggaran serta komitmen aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Instansi teknis yang terkait pemberian rekomendasi penerbitan izin .

Adapun beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Pengembangan Aplikasi perizinan online yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang perizinan terkait ; Persyaratan, simulasi perhitungan retribusi, pendaftaran perizinan secara online dan pengaduan secara online.
- Sosialisasi Peraturan perundangan kepada masyarakat terkait perizinan dan penanaman modal;

- **Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi Izin Usaha.**

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pengukuran pencapaian indikator tersebut baru kami laksanakan di Tahun 2019, hal ini disebabkan karena indikator ini merupakan indikator baru dalam Renstra 2018 – 2023.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 2

*Tabel 3.4.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 2*

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
1	2	3	4	3-4
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan perizinan	67%	100%	-33%

2	Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	100%	38%	62%
3	Persentase Rumah Ber-IMB	93%	100%	-7%
4	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	109%	100%	9%

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat,**

Berdasarkan tabel diatas nilai yang dicapai pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2017 dan 2018 dengan nilai indeks kepuasan ditahun 2019 adalah B dikategorikan baik.

- **Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan.**

Berdasarkan tabel diatas presentase penanganan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%.

- **Presentase Rumah Ber – IMB**

Berdasarkan tabel diatas presentase Rumah Ber – IMB pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai Jumlah Rumah wajib IMB tahun 2019 sebesar 133.893 dan rumah yang telah memiliki IMB sebesar 192.375 dan tahun 2018 jumlah rumah wajib IMB sebesar 129.375 dan jumlah rumah yang memiliki IMB sebesar 94.661.

- **Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha**

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 dan 2018 belum dilaksanakan sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sekarang dimana pada tahun 2019 mencapai 71% dengan jumlah pelaku usaha sebesar XXX dan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin sebesar XXX

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini kurang baik karena rata rata realisasi penggunaan anggarannya lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerja .

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.4.5
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
Persentase Rumah Ber-IMB	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 859.451.800	847.542.150	99%
Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan (Izin)	Rp 105.449.000	105.449.000	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Administrasi Perizinan (Izin)	Rp 103.162.500	103.162.500	
Presentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan (Dok)	Rp 4.724.900	4.724.900	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan (Dok)	Rp 39.594.100	39.544.100	
	Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan (Dok)	Rp 94.490.800	94.436.400	
	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan (Izin)	Rp 396.761.800	393.761.800	
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	Rp 13.432.600	13.432.600	
	Penanganan Pengaduan Pelayanan (Laporan)	Rp 14.286.100	5.480.850	
	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan (Dok)	Rp 87.550.000	87.550.000	
		Rp 859.451.800	Rp847.542.150	99%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dari program ini adalah untuk Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait perizinan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung keempat program ini adalah sebesar Rp. 859.451.800 realisasi sebesar Rp. 847.542.150 atau 100% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

1. Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan
2. Pelayanan Administrasi Perizinan
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan
4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan
5. Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan
6. Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan
7. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
8. Penanganan Pengaduan pelayanan
9. Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan

7. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun capaian pada sasaran 2 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin baik Izin Mendirikan Bangunan maupun izin usaha, namun untuk mengatasi hal tersebut Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengawasan langsung ke masyarakat juga mengadakan sosialisasi peraturan perundangan tentang perizinan, serta pengembangan aplikasi perizinan online untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin.

Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3

*Tabel 3.5.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1	Nilai PMDN/PMA Pertahun	150M	158.260	106%

Berdasarkan tabel diatas realisasi capaian target mencapai 106% dengan nilai target 150.000.000.000 dan realisasi 158.260.000.000.

2. *Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya*

*Tabel 3.5.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja*

NO.	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019
1	Nilai PMDN/PMA Pertahun	263.100M	135.925M	158260M

Berdasarkan tabel diatas pencapaian nilai investasi tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan.

3. *Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir renstra*

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2019	CAPAIAN %
1	Nilai PMDN/PMA Pertahun	263.100M	135.925M	158260M	

4. *Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.*

Nilai PMDN / PMA per tahun

Berdasarkan tabel diatas capaian target dari kegiatan ini sudah mencapai target bahkan ditahun 2019 mengalami pencapaian melebihi 100 persen hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan Promosi terkait potensi iklim investasi di Kabupaten Bone sudah mulai membaik khususnya dalam menarik Investor dalam negeri sedangkan dari sisi investor Penanaman Modal Asing (PMA) sangat belum optimal hal ini dapat dilihat dari presentase capaian target pada tabel diatas.

5. *Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya*

Tabel 3.5.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2019	EFISIENSI
1	2	3	4	3-4
1	Nilai PMDN/PMA Pertahun	106%	98%	8%

Pencapaian kinerja indikator Nilai PMDN mampu menunjang pencapaian kinerja nilai PMA dengan Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 106%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 98% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 3 adalah 8%.

6. *Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja*

Tabel 3.5.4
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
Nilai PMDN / PMA per tahun	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 31.764.200	31.354.200	99%
	Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal (Dok)	Rp 15.109.500	14.969.500	
	Peningkatan Pelayanan Investasi (Dok)	Rp 16.654.700	16.384.700	
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Rp 30.973.900	30.473.900	98%
	Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi (Dok)	Rp 28.583.900	28.083.900	
	Penyusunan Data Peluang Investasi (Buku)	Rp 2.390.000	2.390.000	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 497.994.200	496.094.911	100%
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunias Usaha (Dok)	Rp 26.977.000	26.977.000	

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
	Peningkatan kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Keg)	Rp 32.455.000	32.165.000	
	Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi (Peserta)	Rp 33.410.000	32.498.750	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi (Keg)	Rp 405.152.200	404.454.161	
		Rp560.732.300	Rp 557.923.011	99%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui kegiatan :

- Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
- Peningkatan Pelayanan Investasi
- Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi
- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunias Usaha
- Peningkatan kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi
- Penyusunan Data Peluang Investasi
- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Tujuan dari program pada sasaran ini adalah Meningkatkan Investasi di kabupaten Bone. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian output kinerja berupa keikutsertaan dalam pameran pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Selain itu pengembangan sistem pelayanan perizinan bagi investor juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari sasaran ini.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan yang berarti dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja, yang belum optimal adalah belum berhasilnya

mendatangkan Penanam Modal Asing (PMA) meskipun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sudah melebihi target yang direncanakan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Gambaran Umum Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Bone

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun 2019 hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Bone T.A. 2019. Nilai pagu anggaran tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tergambar pada tabel berikut :

*Tabel 3.6.1
Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kab. Bone Tahun 2018 dan 2019*

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN		
	(Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran-DPPA)		
	Tahun 2018	Tahun 2019	% Kenaikan/(Penurunan)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp .581.162.831	Rp 3.953.882.601	53%
(Gaji & Tunjangan Pegawai)			
BELANJA LANGSUNG	Rp3.100.000.000	Rp 7.650.000.000	59%
(Program dan Kegiatan)			
- Belanja Pegawai	Rp 140.850.000	Rp -	100%
- Belanja Barang/Jasa	Rp 2.740.205.000	Rp 2.594.800.000	-6%
- Belanja Modal	Rp 218.945.000	Rp 5.055.200.000	96%
TOTAL ANGGARAN	Rp 5.681.162.831	Rp 11.603.882.601	51%

Perbandingan alokasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. Bone terhadap total anggaran belanja pada APBD T.A. 2015-2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.2
Alokasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terhadap APBD Kab. Bone T.A. 2018

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN BELANJA		
	DPPA Itda	APBD-P Kab. Bone	% Terhadap APBD
2015	Rp 2.310.316.200	Rp 2.020.021.255.842	0,0011%
2016	Rp 3.592.951.200	Rp 2.182.915.567.776	0,0016%
2017	Rp 4.969.670.500	Rp 2.335.930.580.063	0,0021%
2018	Rp 5.681.162.831	Rp 2.353.404.828.655	0,0024%
2019	Rp11.603.882.601	Rp. 2.526.979.745.701	0,46%

Secara proporsional, anggaran untuk peningkatan pelayanan publik yang mendukung peningkatan Investor di Kabupaten Bone belum optimal, dilihat dari beban kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pusat pelayanan perizinan satu pintu, pengembangan iklim investasi dan pemungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Namun, hal tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Seluruh Aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Bone terpilih periode tahun 2018-2023.

Realisasi Keuangan Tahun 2019

Adapun realisasi keuangan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada tahun anggaran 2019 mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.002.440.169,-, atau 91,31 % dari total pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.3

*Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Bone Tahun 2019*

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 2.581.162.831	Rp 2.281.617.898	88%
(Gaji & Tunjangan Pegawai)			
BELANJA LANGSUNG	Rp 7.650.000.000	Rp 2.622.860.172	97%
- Belanja Pegawai	Rp 140.850.000	Rp 127.800.000	91%
- Barang dan Jasa	Rp 2.740.205.000	Rp 2.672.267.415	98%
- Belanja Modal	Rp 218.945.000	Rp 217.538.750	99%
TOTAL ANGGARAN	Rp 5.681.162.831	Rp 5.299.224.063	93%

Pemanfaatan Anggaran Tahun 2019

Pemanfaatan anggaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone yang sepenuhnya bersumber dari DAU APBD Kab. Bone T.A. 2019, tergambar secara umum pada tabel diatas, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.281.617.898,- (88%), digunakan hanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama satu tahun anggaran, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) & Tunjangan Beban Kerja, yang berlaku setelah perubahan anggaran untuk 3 bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2019).

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.622.860.172,- (20%), digunakan untuk pelaksanaan 11 program dan 33 kegiatan pada tahun 2019. Realisasi anggaran terbesar untuk belanja langsung dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan

Permasalahan dan Solusi

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

-
1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
 6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset;
 7. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upayapertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III dengan capaian 96% atau dikategorikan BAIK hal ini menggambarkan bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke depan, dalam hal ini keterampilan aparatur dalam mengoperasikan komputer/ laptop masih sangat minim sehingga dianggap menghambat pelayanan perizinan khususnya layanan perizinan online, sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal masih belum cukup untuk memberikan pelayanan sesuai SOP.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.